

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis batas wilayah di daerah selatan Kabupaten Bantul adalah laut, sehingga Kabupaten Bantul banyak memiliki kawasan pantai yang dijadikan sebagai obyek wisata. Selain pantai, Kabupaten Bantul memiliki banyak tempat wisata lain seperti, Bukit Paralayang, Goa peninggalan Belanda, Hutan Pinus, Goa Selarong, Pantai Parangtritis beserta gumuk pasir.

Gumuk pasir terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari Parangtritis Geomaritime Since park (PGPS), luas Gumuk Pasir Parangtritis mencapai 413 hektare yang meliputi zona inti 141 hektare, zona terbatas 95,3 hektare dan zona Penunjang 171,6 hektare dan secara klasifikasi gumuk pasir yang berada di daerah Pantai Parangtritis adalah gumuk pasir tipe Barkhans atau bulan sabit. Tipe gumuk pasir ini terbentuk alami sebagai akibat terbawanya pasir pantai halus oleh angin laut ke daratan dan lama-lama akan membentuk gundukan yang tinggi. Bentang alam gumuk pasir sangat menarik dikarenakan tidak semua wilayah di Indonesia memiliki gumuk pasir, apalagi

gumuk pasir tipe Barkhan karena tipe ini sulit terbentuk di daerah iklim hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi<sup>1</sup>.

Menjadi salah satu bentang alam yang tidak dimiliki setiap negara, gumuk pasir menjadi tempat yang menarik untuk dijadikan sebagai obyek wisata. Gumuk Pasir Parangtritis menjadi salah satu obyek pengembangan wisata karena letaknya yang dekat dengan Pantai Parangtritis yang sudah terkenal dan memiliki kemudahan aksesibilitas. Pengembangan obyek wisata gumuk pasir memberikan dampak positif terhadap masyarakat maupun daerah. Masyarakat mendapatkan kesempatan berusaha ataupun lapangan pekerjaan, sedangkan untuk daerah mendapatkan pemasukan dalam bentuk pajak, retribusi, ataupun pungutan wisata lainnya.

Setiap pengembangan obyek wisata harus disertai oleh izin yang berupa tanda daftar pariwisata (TDUP). Hanya saja dalam praktek ada pengelolaan obyek wisata yang tidak mempunyai izin, hal inilah yang dapat menimbulkan dampak negative bagi usaha pariwisata. Salah satu bentuk dampak negatif dari usaha pariwisata adalah kerusakan lingkungan termasuk lingkungan Gumuk Pasir Parangtritis.

Salah satu bentuk kegiatan pariwisata dikawasan Gumuk Pasir Parangtritis adalah penyewaan kendaraan (*jeep*) untuk mengitari kawasan gumuk pasir yang luas. Rute yang digunakan dalam oprasional sehari-hari *jeep* tersebut melintasi tengah kawasan gumuk pasir. Keberadaan taman

---

<sup>1</sup> Kus, 2018, *Selamatkan Gumuk Pasir Prangtritis*, Radar Jogja, Jawa Pos, Yogyakarta, hlm. 6.

bunga matahari yang sebenarnya bertujuan untuk menarik pengunjung juga ikut berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Jika dibiarkan kegiatan tersebut secara terus menerus akan menyebabkan hilangnya tipe gumuk pasir barkhan.

Hilangnya gumuk pasir dapat mengakibatkan fungsi ekologi yaitu pencegah bencana kepebisiran yang dimiliki oleh gumuk pasir tidak berjalan, secara umum gumuk pasir memiliki fungsi untuk mencegah intrusi air laut ke air tanah, mencegah adanya abrasi, dan penghalang pertama ketika terjadi tsunami. Melihat beberapa fungsi penting yang dimiliki oleh gumuk pasir, dan sesuai dengan Pasal 6 huruf h Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami, gumuk pasir wajib dilestariakan sebagaimana bentuk aslinya karena gumuk pasir merupakan salah satu jenis habitat in situ. Ditambah lagi dengan Perda Kabupaten Bantul No. 12 tahun 2015 yang mengatur lebih rinci tentang perlindungan kelestarian Gumuk Pasir Parangtitis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, salah satu persoalan hukum yang penting adalah pengendalian kerusakan gumuk pasir akibat adanya pengembangan obyek wisata di Pantai Parangtitis, Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengendalian kerusakan gumuk pasir akibat pengembangan obyek wisata di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pengendalian kerusakan gumuk pasir akibat adanya pengembangan obyek wisata di Pantai Parangtritis.

### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

#### **a. Dinas Lingkungan Hidup**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sebagai akibat perkembangan wisata, terutama di daerah Gumuk Pasir Parangtritis.

#### **b. Dinas Pariwisata**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata, dalam rangka pengelolaan pariwisata berkelanjutan di kawasan Gumuk Pasir.

#### **c. Dinas Perizinan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk dinas perizinan dalam rangka mengeluarkan izin pariwisata untuk kawasan wisata baru maupun wisata yang telah ada dan masih illegal.

d. Dinas Kehutanan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk dinas kehutanan dalam pengambilan keputusan penanaman pohon yang dilakukan di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis dengan memperhatikan fungsi ekologi yang dimiliki.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan Judul Pengendalian Kerusakan Gumuk Pasir Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hasil karya penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi. Ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul dengan rencana penelitian yaitu:

1. Tedy Verdyanto Kurniawan, NPM 100510347, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Sukoharjo. Rumusan masalah yang dipaparkan adalah Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitiannya BLH Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal. BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai.

R Moh Abdul Azi, NIM 09/282609/HK/18153, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, menulis dengan Judul Tidak Ada Payung Hukum Gumuk Pasir Rawan di Eksploitasi. Rumusan masalah yang dipaparkan Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam konservasi gumuk pasir di kawasan Parangtritis? Hasil penelitian yang didapatkan adalah belum adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga sulit untuk menjaga kelestarian Gumuk Pasir. Peran pemerintah dalam pelestarian ekosistem Gumuk Pasir masih sangat minim, maka penulis menyarankan untuk cepat dikeluarkannya produk hukum terkait keberadaan Gumuk Pasir.

2. Widya Ayu Elzha Dani, NIRM: E100150010, Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, menulis dengan judul Analisis Dinamika Penggunaan Lahan Di Area Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2003-2014. Rumusan masalah yang dipaparkan

adalah Bagaimana Dinamika Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis Tahun 2003 – 2014? Hasil penelitian yang didapatkan adalah Dinamika penggunaan lahan dari periode tahun 2003-2014 menunjukkan semakin berkurangnya luasan area gumukpasir dan meningkatnya penggunaan lahan lain oleh aktivitas manusia, dimana luas area gumukpasir dalam kurun waktu 11 tahun berkurang sebanyak 178,13 hektar, sedangkan penggunaan lahan lain luasnya bertambah dan persebarannya semakin mendesak zona inti yang akan mengganggu perkembangan area gumukpasir Parangtritis. Dinamika penggunaan lahan terjadi karena adanya beragam kepentingan dan kebutuhan pihak terkait (stakeholder) di dalam area gumukpasir Parangtritis yang memiliki sudut pandang masing-masing terhadap pengelolaan area gumukpasir. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait di area zona inti gumukpasir sebelah selatan akan dibuat lorong angin namun realisasi pembuatannya masih menunggu waktu yang tepat karena masih dalam proses pembahasan.

3. Ketiga tulisan tersebut berbeda dengan topik penelitian yang direncanakan penulis dalam hal tempat dan fokus penelitian. Tulisan Tedy Verdyanto Kurniawan membahas tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran sungai Bengawan Solo, sedangkan penulis akan membahas tentang perlindungan kawasan gumuk pasir akibat adanya pengembangan pariwisata. Tulisan R. Moh Abdul Azi

membahas tentang keberadaan payung hukum untuk perlindungan Gumuk Pasir Parangtritis, sedangkan rencana penulis lebih terkait pada pengendalian kerusakan gumuk pasir akibat adanya pengembangan obyek wisata di Pantai Parangtritis. Tulisan Widya Ayu Elzha Dani membahas tentang penggunaan lahan dari aspek geografi dan membahas dampak yang ditimbulkan untuk kesuburan tanah dan perunuran luas lahan.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Pengendalian**

Pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam Pasal 13 UUPPLH dilakukan dengan tiga cara dalam yaitu pencegahan, penganggulangan, dan pemulihan. Dalam hal ini yang direncanakan penulis adalah pengendalian kerusakan lingkungan Gumuk Pasir Parangtritis akibat adanya pengembangan pariwisata.

##### **2. Kerusakan Lingkungan**

Menurut Pasal 1 angka 17 UUPPLH, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini kerusakan lingkungan yang dimaksud penulis adalah kerusakan lingkungan Gumuk Pasir Parangtritis.

##### **3. Gumuk Pasir**



Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sepadan Pantai, Gumuk Pasir adalah ekosistem berupa bukit/gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin, dalam hal ini adalah Gumuk Pasir Parangtritis.

#### 4. Obyek wisata

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 9 Tahun 1990 obyek wisata dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, dalam hal ini adalah obyek wisata Gumuk Pasir Parangtritis.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena topik penelitiannya berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer diperoleh dengan hasil wawancara kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Bab I tentang ketentuan umum yang memuat tentang pengertian pariwisata secara umum, obyek pariwisata, dan fungsi pariwisata.
- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Bab I tentang Ketentuan Umum yang pada intinya memuat tentang pengertian Lingkungan, Baku Mutu Kerusakan Lingkungan.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bab VIII tentang Badan Lingkungan Hidup, Pasal 25 yang pada pokoknya mengatur bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran di dalam pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan.

- e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami, pada Bab II jenis habitat alami yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gumuk Pasir merupakan salah satu jenis habitat alami yang harus dilestarikan.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IV tentang Pengendalian pencemaran dan/atau Gumuk Pasir.
- g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi.
- h) Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/BGL/2014 tentang Warisan Geologi tertanggal 2 September 2018

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku literature, artikel, karya ilmiah, internet, dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Metode Pengimpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku internet, dan fakta hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan utuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dalam upaya pengendalian kerusakan gumuk pasir akibat pengembangan obyek wisata di pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka agar narasumber dapat menjawab secara jelas dan lengkap sesuai prosesnya, serta peneliti menggunakan alat rekam seperti handphone yang digunakan untuk merekam setiap jawaban narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilakukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Narasumber:

1) Ibu Woro sebagai Kasie Pelestarian Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIY

2) Bapak Suharto sebagai Kasie Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Bantul.

3) Bapak Karman sebagai Kasie OTDWK Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Responden:

1) Bapak Tumarjo sebagai ketua kelompok masyarakat pengelola Gumuk Pasir untuk obyek wisata taman bunga matahari dan pengelola *jeep*.

#### 5. Analisis Data

a. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut.

b. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

c. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.

d. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.